

# Restrukturisasi Perdagangan Internasional

Harus Didasarkan pada Tiga Butir Kesepahaman

2018-09-22 15:02:11

<http://indonesian.cri.cn/20180922/4c28834b-42ed-3ff4-7461-205257ee9d5c.html>

Komisi Uni Eropa dan Kanada pekan ini berturut-turut mengemukakan dokumen konsep reformasi WTO dan rancangannya. Satu minggu lagi, Hakim warganegara Mauritius dari badan naik banding WTO Shree Baboo Chekitan Servansing akan meninggalkan posnya karena masa jabatannya akan jatuh tempo. Badan naik banding WTO mungkin akan sulit beroperasi dengan normal. Sistem perdagangan multilateral global tengah menghadapi krisis paling serius dalam sejarahnya.

Ternyata, bagaimana menghindarkan masalah kelumpuhan mekanisme penyelesaian persengketaan WTO kini menjadi salahsatu tugas paling urgen dalam reformasi WTO. Sedangkan bagaimana mendorong reformasi WTO agar sistem perdagangan multilateral internasional direvitalisasi dalam rangka rangka mendorong perkembangan berkelanjutan dan kemakmuran ekonomi global membutuhkan dicapainya kesepahaman penting oleh ekonomi utama dunia sebagai berikut:

Pertama, melenyapkan gangguan AS terhadap badan naik banding. Dokumen konsep dan rancangan reformasi WTO yang dikemukakan berturut-turut oleh Komisi Uni Eropa dan Kanda menyatakan kegelisihan serius terhadap perbuatan AS yang merusak badan naik banding WTO. Kanada dalam rancangannya mengemukakan harus menjamin dan meningkatkan mekanisme penyelesaian persengketaan WTO. Uni Eropa memperingatkan, kalau AS terus merintang kegiatan pemilihan hakim badan naik banding, mekanisme penyelesaian persengketaan WTO akan hanya dapat dipertahankan maksimal sampai bulan Desember 2019.

Kedua, mengurung proteksionisme dan unilateralisme. Uni Eropa dan Kanada dalam usulan reformasinya mengemukakan, harus diadakan reformasi modern terhadap peraturan perdagangan internasional yang berlaku sekarang demi meningkatkan peranan pengawasan WTO terhadap perdagangan anggotanya. Sejak tahun ini, Uni Eropa secara terpisah mengadakan perundingan dengan AS dan Jepang dan secara terpisah membentuk tim kerja reformasi WTO dengan AS dan Tiongkok, sementara memelihara kontak dengan negara-negara Kelompok 20. Itu ditujukan untuk memperhatikan keprihatinan utama sejumlah negara dan di satu pihak lain bertujuan untuk mengikat perbuatan unilateral dan proteksionisme.

Ketiga, mempertahankan prinsip bermusyawarah dan mengupayakan kesepakatan. Anggota Dewan Negara dan juga Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi baru-baru ini

menyatakan, dalam proses menjajaki dan mendorong restrukturisasi perdagangan internasional, nilai inti dan prinsip pokok WTO tak boleh dilepaskan, hak dan kepentingan sah negara-negara berkembang tak boleh dilepaskan dan semangat bermusyawarah dan mengupayakan kesepakatan itu tak boleh dilepaskan.